

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGENAI IMIGRAN GELAP (Analisis Putusan No. 869/Pid.B/2016/PN.Mks)



**OLEH :
FADEL MUHAMMAD
B111 13 709**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENGENAI IMIGRAN GELAP
(Analisis Putusan No. 869/Pid.B/2016/PN.Mks)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan Oleh

FADEL MUHAMMAD

B111 13 709

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TERHADAP IMIGRAN GELAP

Disusun dan diajukan oleh:

FADEL MUHAMMAD

B111 13 709

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 30 Mei 2017
Dan Dinyatakan Diterima

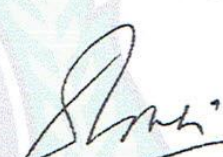
Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Fadel Muhammad
NIM : B111 13 709
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Imigran Gelap (Studi Kasus Putusan Nomor 869/Pid.B/2016/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Mei 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH., MH., M.Si
NIP. 1962 0711 1987 031 001

Pembimbing II



Dara Indrawati, SH., MH.
NIP. 1966 0827 1992 032 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar

Telp: 0411-584686, 587219, E-mail: hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MELAKUKAKAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FADEL MUHAMMAD
Nomor Pokok : B11113709
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Imigran Gelap (Studi Kasus Putusan Nomor 869/Pid.B/2016/PN.MKS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH., MH
NIP. 19610607 198601 1 003



ABSTRAK

FADEL MUHAMMAD (B111 13 709), "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengenai Imigran Gelap (Analisis Putusan No. 869/Pid.B/2016/PN.Mks)". Dibawah bimbingan Bapak Prof.DR.H.M. Said Karim.SH.MH.M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati SH.MH selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap tindak pidana imigran gelap pada perkara No. 869/Pid.B/2016/PN.Mks, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang relevan dengan masalah dalam skripsi ini yakni Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, 1). Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada perkara Nomor 869/Pid.B/2016/PN.Mks telah dapat dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah terbukti dengan dinyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Keimigrasian. 2). Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 860/Pid.B/2016/PN.Mks telah sesuai berdasarkan pertimbangan yuridis normatif dan sosiologis dengan melihat alat-alat bukti yang sah. Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

KATA PENGANTAR



Puja dan puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya beserta nikmat rezeki-Nya berupa kesehatan dan kesempatan waktu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu, Penulis menyadari bahwa sepenuhnya hanya dengan petunjuk-Nyalah sehingga semua hambatan dan kesulitan dapat terlewati. Tak lupa pula Penulis haturkan shalawat dan salam kepada Baginda Muhammad sebagai Rasulullah SAW beserta keluarga yang dimuliakan oleh Allah SWT yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Tak lupa pula Penulis haturkan banyak terima kasih yang tak terhingga serta sembah sujud kepada kedua Orang tua Penulis Ayahanda **H. Gazali** dan **Hj. Herawati Hasan, S.H.**, yang tiada hentinya mendidik dan membesarkan serta senantiasa mengingatkan dan menasihati Penulis, dan memberikan doa yang tiada henti dalam setiap shalat untuk selalu melindungi dan menyertai langkah Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang spesial **Nayllah Utami Ramadhani** yang selalu menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pembimbing Akademik Penulis.
3. **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H. ,M.Si.,** selaku pembimbing I dan **Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H** selaku pembimbing II yang dengan sabar meluangkan waktu serta pikiran dan ilmunya untuk membimbing Penulis.
4. Segenap Dosen-Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi Penulis.
5. Segenap Pegawai bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang memberikan bantuan selama pengurusan berkas Penulis.
6. Sahabat-sahabat Penulis yang senantiasa mengingatkan dan memberikan canda tawa disetiap perjalanan Penulisan skripsi ini.

Dan akhirnya Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap pihak yang ikut mengambil andil dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak kekurangan dalam Penulisan skripsi ini sehingga setidaknya dapat memberikan sedikit manfaat bagi setiap pembaca.

Makassar, 29 Mei 2017

Fadel Muhammad

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	9
B. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
3. Tindak Pidana Keimigrasian	13
C. Pidana dan Pemidanaan.....	15
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	15
2. Jenis-Jenis Pemidanaan	17
3. Teori Tujuan Pemidanaan	24
D. Pengertian Warga Negara	26
E. Keimigrasian di Indonesia	32
1. Pengertian Imigrasi	32
2. Keimigrasian di Indonesia	33
	viii

3. Fungsi Keimigrasian.....	35
4. Jenis-Jenis Izin Tinggal Keimigrasian	42
5. Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Indonesia	46
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	50
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Lokasi Penelitian	58
B. Jenis dan Bahan Data.....	58
C. Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Data.....	58
D. Analisis Data.....	59
BAB IV PEMBAHASAN	60
A. Penerapan Hukum pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Imigran Gelap dalam Putusan No. 869/Pid.B/2016/PN.Mks.....	60
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dalam Putusan No. 869/Pid.B/2016/PN.Mks	71
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dibarengi dengan kemajuan teknologi, perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-batas antar negara tidak menjadi kendala untuk dilalui, bahkan jalur lalu lintas antar Negara pun semakin mudah untuk diakses. Semakin terbuka lebarnya jalur lalu lintas antar Negara pada era globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia antar satu negara ke negara lain.

Fenomena migrasi bukanlah suatu hal yang baru. Selama berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri.

Menurut pandangan sosiologis, manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok. Kehidupan bersama dalam wilayah memberikan kesempatan setiap anggota atau warga negara untuk bergerak bebas, sekaligus ada pembatasan untuk tidak dapat bergerak bebas sebab harus dihormati penguasa suatu wilayah tertentu. Ketika muncul konsep Negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu maka dalam melakukan perlintasan antar negara dan kedaulatan atas wilayah tertentu maka dalam melakukan perlintasan antar negara digunakan paspor yang berizin melewati pelabuhan atau pintu masuk. Paspor ini biasanya memuat

identitas, serta Negara yang mengeluarkan. Oleh karena itu, negara yang mengeluarkan berkewajiban melindungi dimana pun pemegang tersebut berada. Adanya suatu perlintasan tanpa izin dari penguasa wilayah tersebut dapat dianggap sebagai intervensi terhadap kedaulatan wilayah Negara lain.

Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat sebagai tempat persinggahan (*transit*) ataupun sebagai tempat tujuan para imigran ilegal dikarenakan bentuk negaranya adalah keputusan memiliki berbagai pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan batas perairan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus-kasus imigran gelap yang terdampar maupun menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari suaka tanpa memiliki dokumen resmi untuk tinggal di negeri ini.

Imigran gelap adalah Undang - Undang tentang keimigrasian diartikan sebagai penyelundupan manusia yang merupakan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau sekelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen

palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Kasus mengenai pelaku tindak pidana keimigrasian yang terjadi di Makassar yaitu kasus imigran gelap sebagaimana di dalam putusan pengadilan negeri Makassar nomor 869/Pid.B/2016/PN.Mks. Tindak pidana keimigrasian tersebut dilakukan oleh seorang yang berkewarganegaraan India yang bernama Kiranpal. Imigran gelap yang bernama Kiranpal tiba di Indonesia sekitar tanggal 17 Januari 2016 tepatnya di kota Medan dengan menumpang kapal laut dari Malaysia dengan membayar 600 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada pemilik kapal. Dari Medan terdakwa berangkat ke Jakarta dan mendapat informasi bahwa di Makassar sedang membutuhkan banyak orang untuk bekerja pada kapal dengan gaji yang besar sehingga memutuskan berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat. Selanjutnya terdakwa berangkat ke Kabupaten Sinjai dan tiba di Wisma Belitung bersama dengan imigran lainnya pada tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita. Kemudian kehadiran para imigran tersebut dicurigai oleh salah satu warga sehingga warga tersebut melapor ke Polres Sinjai, sehingga petugas kepolisian melakukan pemeriksaan kepada WNA tersebut, namun sesampainya di Wisma Belitung para WNA tersebut sudah tidak berada di lokasi dikarenakan para WNA tersebut berpindah kerumah salah satu warga yang selanjutnya diamankan ke Polres Sinjai oleh petugas sekitar pukul 23.30 Wita kemudian diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I Makassar bersama

dengan 20(dua puluh) orang asing lainnya karena diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Sesampainya di kantor keimigrasian dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk memasuki Wilayah Hukum Republik Indonesia.

Sebagai orang asing yang berkewarganegaraan India seharusnya Kiranpal dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Keimigrasian, dimana tanda masuk diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi kepada orang asing yang telah memenuhi persyaratan masuk wilayah Indonesia. Tanda masuk bagi orang asing pemegang visa diplomatik atau visa dinas yang melakukan kunjungan singkat di Indonesia berlaku juga sebagai izin tinggal diplomatik atau izin tinggal dinas, sedangkan tanda masuk bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa atau pemegang visa kunjungan berlaku juga sebagai izin tinggal kunjungan.

Apabila tidak dapat menunjukan surat izin maka orang asing tersebut merupakan imigran gelap. Perbuatan yang dilakukan imigran gelap tersebut diancam dengan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mengatur:

Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sebagai Negara demokrasi yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, pemerintah Indonesia wajib memberikan

perlindungan hukum tidak hanya terhadap warga Indonesia saja tetapi juga terhadap warga Negara asing yang berada di Indonesia. Di dalam berbagai instrument peraturan nasional, Pemerintah Indonesia selalu menjamin Hak Asasi Manusia. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi warga Negara asing dapat kita temukan dalam Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, di mana ketentuan tindakan administrasi keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia dan di dalam Pasal 88 Undang-Undang yang sama mengatakan bahwa Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke Negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya .

Suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada orang asing dapat kita temukan pada Pasal 77 UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dimana orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan keberatan pada menteri. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan atau keputusan sewenang-wenang yang mungkin dibuat oleh pejabat pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang asing di Indonesia.

Selain perlindungan dari sisi keimigrasian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap orang dapat kita temukan baik dalam sikap ataupun tindakan pemerintah. Hal ini terlihat pada beberapa instrument hukum yang dikeluarkan pemerintah seperti mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang pengesahan *Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara , Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnatioanl yang terorganisasi). Di dalam Undang-Undang tersebut tergambar jelas bahwa pemerintah menaruh perhatian penting terhadap perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tidak terlepas warga negara asing yang beredar di Indonesia.

Perlindungan terhadap orang asing tidak hanya diberikan melalui peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian saja, tetapi juga di bidang investasi, perkawinan, usaha, dan bekerja dan berada di Indonesia. Walaupun demikian banyaknya kewenangan instansi pemerintah dalam mengatur keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian hukum.

Masuknya imigran gelap di Indonesia meninggalkan dampak negatif dalam bidang politik, sosial-budaya dan keamanan, sehingga penegakan hukum terhadap imigran gelap sangatlah penting. Berdasarkan latar belakang tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka penulis membatasi diri untuk membahas. Permasalahan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen yang sah dalam Putusan No. 869/Pid.B/2016/PN.Mks?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen yang sah dalam Putusan No. 869/Pid.B/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini,yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen yang sah dalam Putusan No. 869/Pid.B/PN.Mks
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen yang sah dalam putusan No. 869/Pid.B/PN.Mks

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tersebut dapat diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat serta mahasiswa dalam rangka pengembangan pola pemikiran yang obyektif terhadap perkara-perkara yang terjadi didalam

lingkungan masyarakat khususnya mengenai keberadaan warga negara asing.

2. Menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyikapi para pencari suaka yang berada di Indonesia. Serta menjadi informasi bagi pemerintah guna meningkatkan ketahanan negara dalam bidang wilayah serta kependudukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis terdiri dari kata "tinjauan" dan "yuridis". Tinjauan berasal dari kata "tinjau" yang artinya mempelajari dengan cermat, memeriksa. kata tinjau mendapat akhiran -an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau, pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa secara sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

Adapun pengertian Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana, adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang dibahas adalah delik apa yang terjadi, siapa pelakunya, unsur-unsur delik yang terpenuhi, pidana dan pertanggungjawaban pidana.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit* atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*.

Sedangankan perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari kenyataan" atau "*een gedeelte van werkelijkheid*" sedangkan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari di kehidupan masyarakat.²

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- (1) Menurut Simons, *Strafbaar feit* yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³
- (2) Roeslan Saleh, menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.

¹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 181

² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 34

³ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 34

- (3) Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam tiga bagian yaitu:

- a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Artinya perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan undang-undang atau belum diatur dalam suatu undang-undang maka perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.

- b. Melawan hukum

Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai "bertentangan dengan hukum" bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum umum

Ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur yang termaksud dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b) Sifat melawan hukum khusus

Ada kalanya kata "bersifat melawan hukum" tercantum secara tertulis dalam rumusan delik. Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana. Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus. Juga dinamakan "sifat melawan hukum facet"

c) Sifat melawan hukum formal

Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana)

d) Sifat melawan hukum materiil

Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

c. Tidak ada alasan pembenar

Meski pun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat "alasan pembenar", maka perbuatan tersebut bukan merupakan "perbuatan pidana".⁴

⁴ I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 57

3. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia di mana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutan oleh pejabat imigrasi. Instansi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang diuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnational terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu lintas orang dari satu negara ke negara lain.

Penyelundupan migran adalah setiap usaha untuk mendapatkan, langsung atau tidak langsung, uang atau keuntungan materiil lain dari masuknya orang secara ilegal (*illegal entry*) ke suatu negara dan orang tersebut bukan warga negaranya atau bukan warga yang mempunyai hak tinggal permanen.

Tindakan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kejahatan yang berbahaya atau patut diduga berbahaya bagi keamanan dan ketertiban

umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa : ⁵

- i. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan,
- ii. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah Indonesia,
- iii. Keharusan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia,
- iv. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Tindakan keimigrasian sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian diluar proses peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 75 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 76 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

Pasal 75 ayat (1)

"Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan."

Pasal 75 ayat (3)

"Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya."

Pasal 76

"Keputusan mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan."

Dalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum atau keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat

⁵ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2007 hal. 10

sekurang-kurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindak dan jenis tindakan serta dapat mengajukan permohonan keberatan atas tindakan keimigrasian tersebut.⁶

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Membahas mengenai pidana tentunya tidak terlepas dari hukum pidana itu sendiri oleh karena itu tanpa hukum niscaya pidana akan diberlakukan secara sewenang-wenang oleh penguasa pada saat memerintah, oleh karena itu antara hukum pidana maupun pemidanaan berbeda artinya sehingga diperlukan penegasan dalam membedakannya. Adapun hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.⁷ Sedangkan Sudarsono mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.⁸

Hukum pidana menurut Moelyanto antara lain bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

⁶ Himpunan Peraturan tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya

⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.92

⁸ Sudarsono, 1994, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, MA dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 102

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya⁹

Sedangkan Pompe memberikan definisi bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan dan keharusan, terhadap pelanggarannya. Negara atau masyarakat hukum mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar penjatuhan dan penerapan pidana.¹⁰

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, norma lain itu misalnya norma agama, kesusilaan, dan sebagainya.¹¹

Pidana itu sendiri berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Kata "Pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "Pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.

⁹ Moelyatno, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

¹¹ Riduan Syahrani, *Loc.Cit*

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pidana dan pemidanaan adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar perundang-undangan hukum pidana.

2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Menurut Lamintang, KUHP dahulu bernama *wetboet va strafrecht voor* Indonesia yang kemudian berdasarkan ketentuan di dalam pasal 6 Undang-Undang No 1 Tahun 1964 kemudian di ubah menjadi kitab undang-undang hukum pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pemidanaan, sebagai mana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 KUHP:¹²

a. Pidana Pokok Terdiri Atas:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda

b. Pidana Pokok Dapat Berupa :

- 1) Pencabutan Dari Hak-Hak Tertentu
- 2) Penyitaan Atau Perampasan Dari Barang-Barang Tertentu
- 3) Pengumuman Dari Putusan Hakim

¹² Lamintang, P.A.F, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35

Berdasarkan ketentuan di atas, untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP, akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Jenis pidana ini merupakan pidana yang terberat dan paling banyak mendapat sorotan dan menimbulkan banyak perbedaan pendapat.

Terhadap penjatuhan pidana mati, KUHP membatasi atas beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang berat saja, seperti:

- a. Kejahatan Terhadap Negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 ayat (3), 124 ayat (3) KUHP)
- b. Pembunuhan dengan berencana (Pasal 130 ayat (3), Pasal 140 ayat(3), Pasal 340 KUHP)
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 ayat (4) dan pasal 368 ayat (2) KUHP.

- d. Pembajakan di laut, dipantai, di pesisir, dan disungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut Pasal 444 KUHP

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah untuk sepanjang hidup atau sementara waktu (Pasal 12 KUHP). Lamanya hukuman penjara untuk sementara waktu berkisar antara satu hari sedikit-dikitnya dari 15 tahun berturut-turut paling lama. Akan tetapi dalam beberapa hal lamanya hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan sampai 20 tahun berturut-turut. Maksimum 15 Tahun dapat dinaikkan menjadi 20 Tahun apabila:

- a. Kejahatan di ancam dengan pidana mati.
- b. Kejahatan diancam dengan pidana seumur hidup.
- c. Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, *recidive* atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52 bis KUHP.

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Hal ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-benar menhindahkan/memperhatikan asas-asas dan peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh

perundang-undangan pidana, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana.

3) Pidana kurungan

Pidana ini seperti halnya dengan hukuman penjara, maka dengan hukuman kurungan pun, terpidana selama menjalani hukumannya, kehilangan kemerdekaannya. Menurut Pasal 81 KUHP, lamanya hukuman kurungan berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 1 Tahun paling lama. Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara dan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik, seperti diuraikan sebagai berikut:

- a. Terpidana penjara dapat di angkut kemana saja untuk menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut sesuatu tempat lain diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu (Pasal 21 KUHP)
- b. Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara (Pasal 19 Ayat (2) KUHP).
- c. Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHP). Lembaga yang diatur pada pasal ini terkenal dengan nama *pistole*

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan sengan membayar sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Hasil dari pembayaran denda ini di setor ke kas negara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim / pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Selanjutnya akan dibahas mengenai pidana tambahan seperti berikut ini:

Pidana tambahan terdiri dari:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu adalah pencabutan segala hak jauh dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga negara. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut vos, pencabutan hak-hak

tertentu itu adalah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim.
- Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375. Sifat hak-hak tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur hidup.

Hak-hak dapat dicabut setelah diatur dalam Pasal 35 KUHP. Sedangkan berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur didalam Pasal 38 Ayat (1) KUHP.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Biasa disebut pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam Pasal 39 KUHP, dijelaskan

barang-barang yang dapat dirampas yaitu barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan dan barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP antara lain:

- Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misalnya uang palsu.
- Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misalnya pisau yang digunakan untuk membunuh.

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (*imperative*) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu menjadi keharusan (*imperative*), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat utang, surat dagang).

c. Pengumuman putusan hakim

Di dalam pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan lain maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah

atas biaya terpidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya diketahui melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi dan pembebanan biayanya di tanggung terpidana.

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Ada beberapa Teori-Teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara lebih mendetail mengenai pemidanaan dan apa tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat di kelompokkan ke dalam 3 golongan besar yaitu:

a. Teori absolut dan teori pembalasan

Teori ini merupakan alasan pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, dan terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan

penderitaan seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif), yakni berupa pidana yang tidak lain suatu penderitaan pula.

b. Teori relatif dan teori tujuan

Berdasarkan teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolute atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.

Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakut-nakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang. Ada dua macam prevensi yang dikenal yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Keduanya berdasarkan atas gagasan, bahwa sejak mulai dengan ancaman akan pidana sampai kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut menjalankan

kejahatan. Dalam prevensi khusus, suatu hukuman atau ancaman pidana ditujukan kepada si penjahat agar si penjahat takut melakukan kejahatan, sedangkan dalam prevensi umum suatu hukuman atau ancaman pidana dimaksudkan agar semua oknum takut melakukan kejahatan.

c. Teori gabungan

Teori ini dibagi menjadi dua golongan besar yaitu teori yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasannya tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup agar ketertiban masyarakat dapat dipertahankan. Serta teori yang kedua adalah teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut.¹³

D. Pengertian Warga Negara

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam berpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh secara hukum berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (*citizenship*). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten

¹³ *Ibid*, hlm. 158

disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Nationality (kebangsaan) sebagai suatu pertalian hukum harus dibedakan dari *citizenship* (kewarganegaraan). *Citizenship* adalah suatu status menurut hukum dari suatu negara yang memberi keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebankan kewajiban-kewajiban tertentu kepada individu.

Nationality sebagai istilah hukum internasional menunjuk kepada ikatan, yaitu ikatan seorang individu kepada suatu negara yang memberi kepada suatu negara hak untuk mengatur dan melindungi nasionalnya, meskipun diluar negeri. Walaupun pada umumnya *nationality* itu dirimbag (*derived, derivasi*) dari *citizenship*, tetapi baik *nationality* maupun *citizenship* berasal dari hukum suatu negara, sedangkan *international law* memberi pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak dari suatu negara untuk memberikan *nationality* dan perjanjian-perjanjian (*treaties*) mungkin mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu pula.

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan di artikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut undang-undang kewarganegaraan

Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan di bedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.

Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban negara.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam undang-undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) adalah

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu Warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut

5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang di akui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
9. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak di ketahui keberadaannya
11. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah di kabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

Asas kewarganegaraan adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak di pergunakannya. Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering di jumpai, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Sedangkan dari segi perkawinan, ada dua asas yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.

Imigran adalah orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain yang bukan negaranya. Dalam kamus besar bahasa indonesia, imigran adalah orang yang datang dari negara lain dan tinggal menetap di suatu negara. Dahulu istilah imigran tidak terbatas pada manusia sebagai pelakunya, namun juga dapat digunakan pada

hewan dan benda-benda yang dibawah pindah melintasi perbatasan suatu negara. Awalnya perpindahan penduduk ini terjadi disebabkan oleh peperangan dan bencana alam, sehingga para penduduk mencari wilayah lain yang lebih aman. Kemudian istilah imigran dipersempit terbatas pada manusia saja setelah negara-negara mengalami perkembangan yang secara otomatis juga menciptakan undang-undang dan peraturan. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa:

Untuk menetap di wilayah Indonesia di perlukan adanya izin tinggal tetap yang diberikan kepada warga negara asing yang memiliki surat perjalanan yang sah. Apabila warga negara asing tersebut tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan izin yang tidak jelas, maka pejabat keimigrasian dapat melakukan pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau menolak masuk ke wilayah Indonesia.

Imigran dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu :

a. Imigran Legal

Imigran legal adalah imigran yang memiliki surat perjalanan yang sah dan izin tinggal tetap di wilayah Indonesia dengan maksud dan tujuan yang jelas sebagaimana dicantumkan dalam visa. Dalam

Pasal 3 Undang-Undang Keimigrasian diatur bahwa

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan, atau tanda tertentu yang dapat mengizinkan orang tersebut untuk masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, yaitu berupa izin masuk atau tanda bertolak

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Keimigrasian, pejabat imigrasi berhak menolak atau tidak memberi izin kepada Warga Negara Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia jika tidak memiliki surat perjalanan yang sah dan visa.

b. Imigrasi Ilegal atau *Illegal Immigrant*

Imigran gelap / *Illegal Immigrant* adalah orang-orang yang masuk ke Indonesia baik secara sah maupun tidak yang dikarenakan satu hal menjadi tidak jelas statusnya. Imigran gelap terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) *Illegal stay*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia secara sah dan berdiam di Indonesia kemudian menjadi tidak sah karena *overstay*
- 2) *Illegal Entry*, yaitu orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tidak sah tanpa surat perjalanan dan tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi lalu menghilang. *Illegal immigrant* berstatus *stateless* adalah seorang imigran gelap yang tidak dianggap warga oleh Negara manapun atau seseorang yang tidak menikmati hak fundamental seperti warga lainnya di Negara tempat tinggalnya.

Imigran gelap atau *Illegal migration* diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah. Terdapat 3 bentuk dasar dari imigran gelap :

- 1) Pelintas perbatasan secara Ilegal (tidak resmi)

- 2) Pelintas perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang illegal.
- 3) Pelintas perbatasan secara resmi yang tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi.¹⁴

E. Keimigrasian di Indonesia

1. Pengertian Imigrasi

Imigrasi berasal dari kata "*migrate*" atau kata benda "*migration*" (bahasa Inggris), yang berarti "*go from one country or place of residence to settle in another*" (*the new webster handy college dictionary, 19...*). suatu imigrasi adalah perpindahan secara geografis, baik perorangan maupun secara berkelompok dari suatu tempat atau negara asal ke tempat atau negara lain dengan tujuan untuk menetap.¹⁵ Sekalipun pada mulanya imigrasi berarti perpindahan orang atau kelompok orang dari tempat asal ke tempat baru untuk tujuan menetap, namun dewasa ini mempunyai arti yang lebih luas. Mengacu pada lalu lintas orang antar negara, baik bersifat permanen maupun temporer. Perkembangan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi yang

¹⁴ [http://www.academia.edu/9905460/KAJIAN PERMASALAHAN ILEGAL IMIGRAN](http://www.academia.edu/9905460/KAJIAN_PERMASALAHAN_ILEGAL_IMIGRAN) diakses pada tanggal 10 Maret 2017

¹⁵ Adjat Sudrajat Hafid, *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM tahun 2008, hlm. 175, PT. Tamita Utama Jakarta 2012, hlm. 122

makin cepat dan kompleks, semakin memungkinkan hubungan antar negara dalam jangkauan waktu yang relatif singkat.

2. Keimigrasian di Indonesia

Di Indonesia, pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat Badan Pemerintahan Kolonial Belanda bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigrate Diensts* ditimbang diterimakan dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi dari tangan Pemerintah Belanda ke tangan Pemerintah Indonesia tetapi yang lebih penting adalah peralihan tersebut merupakan titik mula dari era baru dalam politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka diartikan sebagai berbagai keadaan, peristiwa, kejadian. Sedangkan dalam kasus Besar Bahasa Indonesia. kata lalu lintas diartikan sebagai hubungan antara suatu tempat dan tempat lain, hilir-mudik, bolak balik.¹⁶ Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting, yaitu :

- a) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka 2001

- b) Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya kedaulatan negara.

Unsur pertama, pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia dasar 1945, Undang-Undang Republik 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, berdasarkan pasal 1 ayat 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 pengaturan lalu lintas keluar masuknya wilayah Indonesia ditetapkan harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu di pelabuhan laut, Bandar Udara, Pos Lintas Batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah Negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap lalu-lintas keluar masuk wilayah tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 113. Unsur kedua dari pengertian Keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini "pengawasan" adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang ditentukan.¹⁷ Maka pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh

¹⁷ Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press, 2004, hlm. 20

rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol masuk dan keluarnya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan visa yang diberikan sesuai dengan ketentuan Keimigrasian yang berlaku.

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia diluar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh Pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan imigrasi ketika Pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya sesuai dengan maksud dan tujuan orang asing tersebut masuk ke Indonesia, selanjutnya pengawasan beralih ke Kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut guna mengawasi lebih lanjut kegiatan yang dilakukan. Dari keseluruhan prosedur Keimigrasian yang ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik Hukum Keimigrasian yang bersifat selektif.

3. Fungsi Keimigrasian

Dari uraian mengenai pengertian umum, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakikatnya Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta

pengaman terhadap lalu lintas masuk serta keluar orang ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dari pernyataan tersebut, maka secara operasional peran Keimigrasian dapat diartikan dalam konsep 4 (empat) fungsi Keimigrasian.¹⁸ Dimana konsep ini menyatakan bahwa sistem Keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, lembaga, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung 4 (empat) fungsi keimigrasian yaitu:

a. Fungsi Pelayanan Keimigrasian

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA).

Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari :

1) Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dan PLB

2) Pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar Pelayanan bagi Warga Asing terdiri dari:

a) Pemberian Dokumen Keimigrasian (Dokim) berupa : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap

¹⁸ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

(KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) bagi Alat angkut.

b) Perpanjangan Izin Tinggal berupa : Visa kunjungan Satu Kali Perjalanan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

c) Perpanjangan Dokim meliputi Perpanjangan KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.

d) Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak, Tanda Masuk dan Tanda Keluar.

b. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan Hukum Keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah negara hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia ditujukan pada permasalahan :

1) Pemalsuan Identitas

2) Pertanggungjawaban Sponsor

3) Kepemilikan Paspor Ganda

4) Ketertiban dalam pelaksanaan pelanggaran aturan Keimigrasian Penegakan Hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing ditujukan pada permasalahan :

a) Pemalsuan Identitas Warga Negara Asing (WNA)

b) Pendaftaran Orang Asing (POA) dan Pemberian Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA)

- c) Penyalahgunaan Izin Tinggal
- d) Masuk secara tidak sah (Illegal Entry) atau Tinggal secara tidak sah (Illegal Stay)
- e) Pemantauan atau Razia
- f) Kerawanan Keimigrasian secara Geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian tanda masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat Pro Justitia yaitu kewenangan penyidikan tercakup tugas penyidikan dalam mencakup pelanggaran keimigrasian (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasaan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum yang nantinya dalam proses pelaksanaan tersebut imigrasi melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan.

c. Fungsi Keamanan Negara

Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi

keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan Kementrian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan.¹⁹ Sedangkan dalam pelaksanaan penangkalan prinsip dan kebiasaan Internasional yang menyatakan seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri.²⁰ Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah :

- 1) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- 2) Melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan negara lain khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan Hukum Keimigrasian.
- 3) Melakukan operasi intelijen Keimigrasian bagi kepentingan Negara
- 4) Melakukan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

¹⁹ Pasal 91 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

²⁰ Alinea 13 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

d. Fungsi Fasilitator Kesejahteraan Masyarakat

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi sistem perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan Negara Republik Indonesia dengan dunia Internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan antara lain memberikan kemudahan izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga diharapkan akan tercipta investasi yang menyenangkan dan dalam hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era sekarang ini aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat Internasional, terutama di bidang perekonomian demi kesejahteraan. Untuk mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun

peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok keimigrasian serta menghindari adanya tumpang tindih peraturan. Di dalam perkembangan 4 (empat) fungsi imigrasi merupakan pergeseran dari perubahan Trifungsi Imigrasi sebelumnya yang menuntut adanya perubahan yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra yaitu:²¹

"Trifungsi Imigrasi yang merupakan ideology atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan Keimigrasian harus diubah karena perubahan zaman.

Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (territory) yang hanya meliputi keamanan nasional (national security) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut, saya hanya memberi pesan agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari berbagai

²¹ Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutan tertulis pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-52 tanggal 26 Januari 2002

tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berfikir yang semula dalam cara pandang ke dalam (linward looking) menjadi cara pandang ke luar (outward looking) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma Trifungsi Imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan sekuriti agar diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegakan hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi."

Hal tersebut yang menjadi salah satu pemikiran perubahan Trifungsi Imigrasi berdasarkan perkembangan jaman dan era globalisasi sekarang ini menjadi 4 (empat) fungsi Imigrasi dengan ditambah fungsi fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat.

4. Jenis-Jenis Izin Tinggal Keimigrasian.

Dalam pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian tersebut :

- a. Setiap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal
- b. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya
- c. Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - 1) Izin tinggal Diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa diplomatik, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan Menteri Luar

Negeri. Persyaratan yang diperlukan untuk visa diplomatik (Diplomatic Visa), yaitu :

- a) Memiliki paspor diplomatik yang berlaku,
- b) Memiliki referensi dari pemerintah Negara anda (biasanya Departemen Luar Negeri). Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan berkunjung ke Indonesia untuk tugas diplomatik.

Masa berlaku visa diplomatik yaitu 3 (tiga) bulan dari tanggal pemberian untuk visa satu kali perjalanan atau 6 (enam) bulan dari tanggal pemberian untuk visa beberapa kali perjalanan (berdasarkan asas timbal balik). Adapun ketentuan khususnya jika pemegang paspor diplomatik yang akan berkunjung ke Indonesia tidak dalam tugas penting (misalnya berlibur), mendapat visa biasa yang bebas dari bea. Tetapi untuk tinggal paling lama 3(tiga) bulan.

- 2) Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa dinas, permohonan dan pengajuan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri. Persyaratan yang diperlukan visa dinas, yaitu:

- a) Memiliki paspor dinas(service visa) yang berlaku,
- b) Memiliki referensi dari pemerintah anda(Departemen Luar Negeri) atau Badan Internasional Organisasi PBB. Menyatakan bahwa pemegang paspor tersebut akan menjalankan tugas resmi di Indonesia.

3) Izin Tinggal Kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi kepada orang asing yang dibebaskan keharusan memiliki visa kunjungan dan orang asing pemegang visa kunjungan. Izin kunjungan diberikan dalam rangka :

- a) Izin Kunjungan Tugas Pemerintahan yang merupakan izin kunjungan untuk keperluan tugas pemerintah, kegiatan sosial budaya atau usaha diberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikan tanda masuk dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari. (Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan).
- b) Izin Kunjungan Usaha / Bisnis yang merupakan izin kunjungan untuk keperluan usaha/bisnis diberikan selama 60 (enam puluh) hari terhitung diberikan tanda masuk dan tidak dapat diperpanjang (visa kunjungan beberapa kali perjalanan)
- c) Izin Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival) yang merupakan izin kunjungan yang diberikan saat orang asing negara subyek Visa On Arrival sebanyak 65 negara tersebut datang ke Indonesia dengan membeli Visa sebesar 25 Dolar Amerika dan diberikan lama tinggal selama 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan Tanda Masuk dapat diperpanjang 1 (satu) kali perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari

dilakukan pada Kantor Imigrasi wilayah orang asing berkunjung.

- d) Izin Kunjungan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) merupakan izin kunjungan yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998 terhadap 15 Negara beberapa wilayah Asia Tenggara dan menjalin hubungan bilateral kepada Indonesia diberikan Bebas Visa Kunjungan Singkat selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.

4) Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada:

- a) Orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas;
- b) Anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
- c) Orang asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan;
- d) Nahkoda, Awak kapal atau Tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada mereka untuk :

- I. Menanamkan Modal;

- II. Bekerja;
- III. Rohaniawan;
- IV. Mengikuti Pendidikan atau Kuliah;
- V. Menggabungkan diri dengan Keluarga;
- VI. Repatriasi;
- VII. Melakukan Penelitian Ilmiah.
- VIII. Visa Lansia;

5) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada :

- a) Orang asing Pemegang izin tinggal Terbatas sebagai Rohaniawan, pekerja, Investor, dan Lanjut Usia;
- b) Keluarga karena perkawinan campuran;
- c) Suami, istri dan/atau dari orang asing pemegang izin tinggal tetap;
- d) Orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

5. Hukum keimigrasian dalam sistem hukum Indonesia

Dalam ilmu hukum terdapat beberapa ilmu hukum positif sebagai induk, yaitu ilmu hukum pidana, ilmu keperdataan, ilmu hukum kenegaraan dan ilmu hukum Internasional.²² Sejalan dengan perkembangan zaman telah tumbuh pula berbagai cabang ilmu hukum sebagai disiplin hukum baru, seperti hukum administrasi negara, hukum agrarian, hukum pajak, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum kenegaraan, khususnya

²² A. Ridwan Halim, dan Flora Liman P, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*, Jakarta; UKI 2002 hlm. 22

merupakan cabang ilmu dari hukum administrasi negara. Hal itu terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara (*bestuur*) dan pelayanan masyarakat (*public dienst*), bukan pembentukan Undang-undang (*wetgever*) dan bukan juga fungsi peradilan (*rechtspraak*). Dengan demikian, keimigrasian dapat dilihat dalam perspektif hukum administrasi negara. Sesungguhnya, masalah keimigrasian justru merupakan sebagian kebijakan arogan administrasi negara yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara). Kebijakan yang dimaksud adalah gambaran dari perbuatan hukum pemerintah (*overheads handling*). contoh, kewenangan imigrasi untuk menangkal dan mencegah orang yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia. Dalam ilmu pengetahuan hukum dikenal istilah pembagian hukum yang secara khusus terbagi menurut fungsi pengaturannya. Pembagian hukum tersebut dalam prakteknya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bidang Hukum Materiil, terdiri atas:

- a. Hukum negara yang mencakup: Hukum tata negara, dan Hukum administrasi Negara,
- b. Hukum perdata yang mencakup hukum pribadi, hukum benda, hukum perjanjian, hukum keluarga, hukum waris, hukum objek immaterial, dan hukum penyelewengan perdata dan sikap tindak lain,
- c. Hukum pidana

2. Bidang Hukum Formil

- a. Hukum tata negara formil atau hukum acara tata negara
- b. Hukum administrasi negara formil atau hukum acara administrasi negara.
- c. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata.
- d. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

3. Bidang Hukum Hubungan Antar Tata Hukum (HATAH), khusus mengatur penyelesaian perkara yang mengandung pertemuan antara 2 (dua) atau lebih sistem hukum (HATAH intern dan HATAH ekstern).

Luas lingkup keimigrasian tidak lagi hanya mencakup pengaturan, penyelenggaraan masuk-keluar orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang ke wilayah Indonesia dan penangkalan yang harus diterapkan dalam setiap implementasi peran keimigrasian yaitu :

- a) Asas-asas umum penyelenggaraan administrasi yang baik (*general principles of good administration*) yang mencakup atas persamaan perlakuan, asas dapat dipercaya, asas kepastian hukum, asas motivasi yang benar, ass larangan melampaui wewenang, asas tidak sewenang-wenang, asas keseimbangan dan asas keterbukaan. Oleh karena itu setiap tindakan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan bagi koreksi dan pelaksanaan

kewajiban hukum aparat keimigrasian atau ganti rugi sudah tidak mungkin lagi dipulihkan. Setiap keputusan yang bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar tuntutan atau pembatalan, disertai ganti rugi,

- b) Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dilaksanakan menurut ukuran hukum yang berlaku mencakup ukuran kewenangan, ukuran isi tindakan atau isi keputusan, ukuran tata cara melakukan tindakan atau membuat keputusan, sebab tindakan atau keputusan yang bertentangan dengan asas legalitas dapat mengakibatkan tindakan atau keputusan yang bersangkutan batal demi hukum.

Dalam hal ini, perspektif yang lebih besar lagi, dapat dikatakan bahwa hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum ekonomi. Dalam perspektif pembangunan nasional, hukum mempunyai peranan yang penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi, sebab melalui hukum, selain menetapkan hak dan kewajiban, proses serta kelembagaan dari setiap kegiatan interaksi ekonomi juga diberikan kepastian mengenai subjek dan objek hukum dalam setiap kegiatan ekonomi. Karena semakin banyak peraturan yang mengatur bidang perekonomian dengan menggunakan kaidah hukum administrasi negara ini, terbentuklah bidang baru yang disebut hukum ekonomi dalam arti sempit yang diberi nama *droit economique*.

Hal yang membuktikan bahwa kaidah hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum ekonomi dalam arti sempit adalah ketika kepemilikan hak orang asing atas satuan rumah susun (apartemen dan kondominium) di Indonesia hanya diberikan apabila orang asing tersebut adalah pemegang KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas). KITAS ini merupakan produk administrasi negara yang berasal dari kaidah keimigrasian.

Demikian pula dengan pemberian izin tinggal keimigrasian, seperti izin tinggal terbatas, ataupun izin tinggal tetap yang dikaitkan dengan investasi pekerjaan, aktivitas perdagangan dan pembicaraan transaksi bisnis.²³

F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Yuridis

Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan bebas (*vrijspraak*), hakim harus benar-benar menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewarganegaraannya masing-masing.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa:²⁴

Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau diktum putusan hakim.

²³ Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

²⁴ Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 193

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni:²⁵

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan nonyurisprudensi dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), waktu kejadian (*tempus delicti*) dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, harus diperhatikan akibat langsung atau tidak dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan, dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Setelah fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum yang sebelumnya telah dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Setelah itu, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah terdakwa telah memenuhi unsur-

²⁵ *Ibid*, hal. 194

unsur tindak pidana yang didakwakan dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan harus menguasai aspek teoretik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Menurut Lilik Mulyadi setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:²⁶

- a) ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- b) ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau penasihat hukum.
- c) ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah

²⁶ *Ibid*, hal. 196

dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan Sosiologis

Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum ini tertuang dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang rumusannya :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebagai upaya pemenuhan yang menjadi kehendak rakyat ini, maka dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan tujuan agar penegakan hukum di negara ini dapat terpenuhi. Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berkaitan dengan masalah ini adalah :

Hakim sebagai penegak hukum menurut Pasal 5 (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat sehingga dia harus turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan

demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka yang penuh dengan muatan normatif dan diikuti dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif. Dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), pengadilan cenderung dibebani tanggung jawab yang teramat berat dan nyaris tidak terwujud.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara adalah :

1. Memperhatikan sumber hukum tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, semakin

besar dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan yang rasional dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, harus juga diperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, yakni hakim harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.

Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sifat tindak pidana (apakah itu suatu tindak pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana itu.
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan tindak pidana tersebut (yang memberatkan atau meringankan).
- d. Pribadi terdakwa yang menunjukkan apakah dia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah dia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- e. Sebab-sebab untuk melakukan tindak pidana.
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara (apakah dia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal, meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya).
- g. Kepentingan umum.

3. Pertimbangan Subjektif

Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- 1) Harus ada perbuatan, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- 2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan hukum. Artinya, perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan pelaku pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dipersalahkan itu dapat disebabkan karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas,

membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat.

- 3) Harus terjadi adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- 4) Harus melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata atau jelas bertentangan dengan aturan hukum.
- 5) Harus tersedia ancaman hukumnya, kalau ada ketentuanketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman tersebut dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelaku. Apabila dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu dalam tindak pidana, maka pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Alasan dipilihnya yakni karena lokasi tersebut pernah menangani beberapa perkara tindak pidana penyusupan WNA ke Indonesia tanpa dokumen yang sah.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Data primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.
- b. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, berkas perkara, karya ilmiah lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-

buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu:

a. Wawancara (*interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti hakim dn jaksa yang menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi

b. Studi Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengambil dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar.

D. Analisis Data

Semua data yang dikumpulann baik data primer maupun data skunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Imigran Gelap dalam Putusan No. 869/Pid.B/2016/PN.Mks

Hakim dalam memeriksa perkara pidana , berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 869/Pid.B/2016/PN.Mks adalah sebagai berikut:

1. Posisi Kasus

Awalnya terdakwa yang bernama Kiranpal tiba di Indonesia sekitar tanggal 17 Januari 2016 tepatnya di Kota Medan dengan menumpang kapal laut dari Malaysia dengan membayar sekitar 600 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada pemilik kapal.

Dari Medan terdakwa Kiranpal berangkat ke Jakarta selanjutnya terdakwa Kiranpal mendapat informasi kalau Makassar sedang membutuhkan banyak orang untuk bekerja pada kapal dengan gaji yang besar sehingga terdakwa Kiranpal berangkat ke Makassar dengan menggunakan Pesawat.

Selanjutnya terdakwa Kiranpal berangkat ke Sinjai dan tiba di Wisma Belitung bersama dengan orang India dan Bangladesh sekitar 20 (dua puluh) orang pada tanggal 13 februari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita.

Namun pada malam harinya mereka pindah dari Wisma Belitung ke rumah salah seorang penduduk (warga Sinjai) yang bernama Awaluddin yang terletak di perbatasan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone hingga akhirnya diamankan oleh petugas dari Polres Sinjai sekitar pukul 23.30 Wita, dan kemudian diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I Makassar bersama dengan 20 (dua puluh) orang asing lainnya karena diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

PRIMAIR:

Terdakwa Kiranpal pada hari Sabtu tanggal 13 februari 2016 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari 2016 bertempat di Wisma Belitung Jl. K.H. Agus Salim Kabupaten Sinjai atau di salah satu rumah penduduk di Kabupaten Sinjai atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai namun oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dri Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasrkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara terdakwa yang, **masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen dan vusa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 8**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi Amiruddin (Kanit 3 Intelkam Polres Sinjai) menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan keberadaan beberapa orang asing di Wisma Belitung di Jl. K.H Agus Salim Kabupaten Sinjai,
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi Amiruddin bersama beberapa personil dari Polres Sinjai berkordinasi dengan pemilik Wisma untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pemilik Wisma membenarkan, namun ternyata mereka sudah meninggalkan Wisma sehingga pihak Polres Sinjai melakukan pencarian dan akhirnya menemukan sekitar 20 (dua puluh) orang asing, diantaranya terdakwa Kiranpal yang saat itu berada dirumah salah seorang penduduk yang beranama Awaluddin yang terletak diperbatasan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone,

- Selanjutnya ke 20 (dua puluh) orang asing tersebut dibawa ke Mapolres Sinjai untuk diperiksa lebih lanjut,
- Bahwa dari pemeriksaan petugas di Polres Sinjai keberadaan beberapa mereka di Kabupaten Sinjai adalah mereka akan menumpang kapal nelayan dari Sinjai yang akan berangkat ke Australia,
- Bahwa saat petugas menanyakan dokumen apa yang mereka miliki, dari 20 (dua puluh) orang asing tersebut hanya 3 (tiga) orang warga Negara India yang memiliki paspor, 3 (tiga) orang memiliki Kartu ijin tinggal sementara (KITAS), & (tujuh) orang memiliki sertifikat Asilum seeker dari UNHCCR sementara yang lainnya tidak memiliki dokumen dari negaranya yang dibutuhkan untuk masuk maupun berada di wilayah Indonesia,
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 pukul 11.30 Wita 20 (dua puluh) orang asing diantaranya terdakwa Kiranpal diserahkan Kepolisian Resort Kabupaten Sinjai ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar untuk diproses lebih lanjut karena diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian,
- Bahwa selanjutnya saksi Ariel El Mubarak dan saksi Asran yang merupakan pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar mengecek data setiap orang asing tersebut dan menanyakan dokumen perjalanan atau paspor serta dokumen identitas dari Negara mereka berasal,
- Bahwa dari hasil pemeriksaan itu, terhadap terdakwa Kiranpal menerangkan kalau terdakwa tidak memiliki paspor maupun dokumen Resmi lainnya yang dapat digunakan untuk masuk ataupun berada di Wilayah Republik Indonesia,
- Bahwa terdakwa Kiranpal tiba di Indonesia sekitar tanggal 17 Januari 2016 tepatnya di Kota Medan dengan menumpang kapal laut dari Malaysia atau sekitr Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada pemilik kapal,
- Bahwa dari Medan selanjutnya terdakwa Kiranpal berangkat ke Jakarta selanjutnya terdakwa Kiranpal mendapat informasi kalau di Makassar sedang membutuhkan banyak orang untuk bekerja pada kapal dengan gaji uang besar sehingga terdakwa Kiranpal berangkat ke Makassar dengan menggunakan Pesawat,
- Bahwa selanjutnya Kiranpal berangkat di Sinjai dan tiba di Wisma Belitung bersama dengan orang India dan Bangladesh sekitar 20 (dua puluh) orang pada tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 Wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Atau
SUBSIDIR:

Terdakwa Kiranpal pada hari Sabtu 13 Februari 2016 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari 2016 bertempat di Wisma Belitung Jl.K.H Agus Salim Kabupaten Sinjai atau di salah satu rumah penduduk di kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai namun oleh karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkara terdakwa yang **dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Kiranpal tiba di Indonesia sekitar tanggal 17 Januari 2016 tepatnya di Kota Medan dengan menumpang kapal laut dari Malaysia dengan membayar sekitar 600 Ringgit Malaysia atau sekiyar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada pemilik kapal,
- Bahwa dari Medan selanjutnya terdakwa Kiranpal berangkat ke jakarta selanjutnya terdakwa Kiranpal mendapat informasi kalau di Makassar sedang membutuhkan banyak orang untuk bekerja pada kapal dengan gaji uang besar sehingga terdakwa Kiranpal berangkat ke Makassar dengan menggunakan Pesawat,
- Bahwa selanjutnya terdakwa Kiranpal berangkat ke Sinjai dan tiba di Wisma Belitung bersama dengan orang India dan Bangladesh sekitar 20 (dua puluh) orang pada tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita,
- Namun pada malam harinya mereka pindah dari Wisma Belitung ke rumah salah seorang penduduk (warga Sinjai) yang bernama Awaluddin yang terletak diperbatasan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone hingga akhirnya diamankan oleh petugas dari Polres Sinjai sekitar pukul 23.30 Wita, dan kemudian diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar bersama 20 (dua puluh) orang asing lainnya karena diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian.
- Bahwa selanjutnya saksi Ariel El Mubarak dan saksi Asran yang merupakan pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar mengecek data setiap orang tersebut dan menanyakan dokumen perjalanan atau Paspor serta dokumen identitas dari Negara mereka berasal,
- Bahwa dari hasil pemeriksaan itu, terhadap terdakwa Kiranpal menerangkan kalau terdakwa tidak memiliki Paspor , sehingga

saat masuk Wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2016, Nomor Reg. Perkara PDM-352/R.4.10/Euh.1/04/2016 , yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa KIRANPAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MASUK DAN/ATAU BERADA DIWILAYAH INDONESIA DENGAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PERJALANAN DAN VISA YANG SAH DAN MASIH BERLAKU**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Sebagaimana dalam Dakwaan Pertama. Sehingga pada akhir tuntutan pidananya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIRANPAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan Denda sebesar Rp. 100 juta Subsida 1 (satu) Bulan Penjara dengan dikurangi selam terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
- b. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah dompet dikembalikan kepada terdakwa Kiranpal;
- c. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

4. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa **KIRANPAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MASUK DAN/ATAU BERADA DIWILAYAH INDONESIA DENGAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PERJALANAN DAN VISA YANG SAH**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama **6 (enam) bulan, dan Denda sebesar Rp. 100 juta Subsidiar 1 (satu) Bulan Penjara;**
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Kiranpal;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Analisis Penulis

Dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu **Kesatu, Primair: didakwa dengan Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian dan Kedua, subsidair; didakwa dengan Pasal 113 Ayat (1) UU Keimigrasian;**

Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim bahwa dakwaan pertama yang

memiliki potensi bersesuaian dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini sudah tepat, dimana penuntut umum didalam dakwaannya telah benar yang tuntutan nya menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana masuk dan berada diwilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian. Ada beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam memutus tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah **Tindak Pidana masuk dan berada diwilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen yang sah sesuai dengan penuntut umum**, yang akan penulis uraikan secara jelas pada pembahasan rumusan masalah selanjutnya (Pertimbangan Hakim).

Kemudian apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menunjuk pada subyek hukum pemangku hak dan kewajiban dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang mempunyai pertanggungjawaban pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa Kiranpal, yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat

dakwa, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa ini telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau unsur barang siapa dalam putusan perkara No. 869/Pid.B/PN.Mks).

2. Unsur masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan wilayah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan keterangan para saksi-saksi, ahli, dan keterangan terdakwa terungkap fakta:

- Bahwa Kabupaten Sinjai merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang masih merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia
- Bahwa terdakwa Kiranpal tiba di Indonesia sekitar tanggal 17 Januari tepatnya di Kota Medan dengan menumpang kapal laut dari Malaysia dengan membayar sekitar 600 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada pemilik kapal
- Bahwa dari Medan selanjutnya terdakwa Kiranpal berangkat ke Jakarta dan setelah di Jakarta terdakwa Kiranpal berangkat ke Makassar dengan menggunakan Pesawat, dan selanjutnya terdakwa Kiranpal berangkat ke Sinjai dan tiba di Wisma Belitung bersama dengan orang India dan Bangladesh sekitar 20 (dua puluh) orang pada tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita. Namun pada malam harinya mereka pindah dari Wisma

Belitung ke rumah salah seorang penduduk (warga Sinjai) yang bernama Awaluddin yang terletak diperbatasan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone hingga akhirnya diamankan oleh petugas dari Polres Sinjai pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, dan kemudian diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar bersama dengan 20 (dua puluh) orang asing lainnya karena diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian.

- Bahwa tujuan kedatangan terdakwa ke Kabupaten Sinjai adalah untuk bekerja di kapal ikan sehingga bisa keluar ke Australia
- Bahwa baik kota Medan yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Kota Jakarta yang berada di Provinsi DKI Jakarta, dan Kota Makassar serta Kabupaten Sinjai yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan semua wilayah kedaulatan Republik Indonesia
- Bahwa selama berada di Indonesia, terdakwa tidak pernah melapor ke tempat pemeriksaan Imigrasi dan terdakwa juga tidak memiliki dokumen perjalanan berupa Paspor maupun Visa.

Sebagaimana perbuatan terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia" telah terbukti atas diri Terdakwa.

3. Unsur yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 8

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:

1. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku
2. Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa yang dimaksud dengan

Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang disuatu Negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau Organisasi Iternasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar Negara yang memuat identitas pemegangnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di Tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk Pemberian Izin Tinggal.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,bahwa setiap orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk wilayah Indonesia setelah mendapatkan tanda masuk.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan Paspor kebangsaan adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Negara Asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan terdakwa terungkap fakta:

- Bahwa terdakwa Kiranpal tiba di Indonesia sekitar tanggal 17 Januari 2016 tepatnya di kota Medan dengan menumpang kapal laut dari Malaysia dengan membayar sekitar 600 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kepada pemilik kapal
- Bahwa dari Medan selanjutnya terdakwa Kiranpal berangkat ke Jakarta dan setelah di Jakarta terdakwa Kiranpal berangkat ke Makassar dengan menggunakan Pesawat, dan selanjutnya terdakwa Kiranpal berangkat ke Sinjai dan tiba di Wisma Belitung bersama dengan orang India dan Bangladesh sekitar 20 (dua puluh) orang pada tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita, namun pada malam harinya mereka pindah dari Wisma Belitung ke rumah salah seorang penduduk (warga Sinjai) yang bernama Awaluddin yang terletak diperbatasan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone hingga akhirnya diamankan oleh petugas dari Polres Sinjai pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, dan kemudian diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar bersama dengan 20 (dua puluh) orang asing lainnya karena diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian.
- Bahwa tujuan kedatangan terdakwa di Kabupaten Sinjai adalah bekerja di kapal ikan sehingga bisa keluar ke Australia
- Bahwa selama berada di Indonesia, terdakwa tidak pernah melapor ke tempat pemeriksaan Imigrasi dan terdakwa juga tidak memiliki dokumen perjalanan berupa Paspor maupun Visa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka ketiga unsur ini telah terpenuhi.

Dari segi pertanggungjawaban pidanannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukannya adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum dan mampu bertanggungjawab didepan hukum, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

B. Perimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dalam Putusan No. 869/Pid.B/2016/PN.Mks

1. Pertimbangan Majelis Hakim

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan. Baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materiil, sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri Hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun kalangan praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif yakni, melanggar ketentuan Pasal 119 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Subsidiar, melanggar ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menurut penilaian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia
3. Yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 8

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap fakta bahwa Kiranpal adalah subyek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi mampu bertanggungjawab, oleh karenanya mengenai unsur "setiap orang" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad. 2. Masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia

Menimbang, bahwa masuk/atau berada diwilayah Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dimaksud wilayah Republik Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, serta Zona tertentu yang ditetapkan berdasar Undang-Undang. Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa terdakwa Kiranpal tiba di Indonesia sekitar Tanggal 17 Januari 2016 tepatnya di Kota Medan dengan menumpang kapal laut dari Malaysia dengan membayar sekitar 600 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp. 2.100.000.-)dua juta seratus ribu rupiah) kepada pemilik kapal.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa dari Medan selanjutnya terdakwa Kiranpal berangkat ke Jakarta setelah di Jakarta terdakwa Kiranpal berangkat ke Makassar dengan menggunakan Pesawat, dan selanjutnya terdakwa berangkat ke Sinjai dan tiba di Wisma Belitung bersama dengan orang India dan Bangladesh sekitar 20 (dua puluh) orang lainnya pada tanggal 13 februari 2016 sekitar pukul 16.30 Wita. Namun pada malam harinya mereka pindah dari Wisma Belitung ke rumah salah seorang penduduk (warga Sinjai) yang bernama Awaluddin yang terletak diperbatasan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bone hingga akhirnya diamankan oleh petugas dari Polres Sinjai pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016

sekitar pukul 23.30 Wita dan kemudian diserahkan ke Kantor Imigrasi Kelas I Makassar bersama dengan 20 (dua puluh) orang asing lainnya.

Bahwa tujuan kedatangan terdakwa ke Kabupaten Sinjai adalah untuk bekerja di kapal ikan sehingga bisa keluar ke Australia.

Bahwa baik kota Medan yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Kota Jakarta yang berada di provinsi DKI Jakarta, dan kota Makassar serta Kabupaten Sinjai yang berada di provinsi Sulawesi Selatan semua wilayah tersebut merupakan Wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Ad. 3. Yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 8

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

1. Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
2. Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian Internasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang disutau Negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau Organisasi Internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar Negara yang memuat identitas pemegangnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang dimaksud Visa Republik Indonesia selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau Tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing yang melakukan Perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi Dasar Pemberian izin tinggal.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapatkan tanda masuk.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Negara Asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antar Negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan yang lainnya terungkap fakta bahwa selama berada di Indonesia sejak 17 Januari 2016 hingga 13

Februari 2016 terdakwa Kiranpal tidak pernah melapor ke tempat Pemeriksaan Imigrasi dan terdakwa tidak memiliki dokumen perjalanan berupa Visa maupun Paspor.

Menimbang, bahwa karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia dengan tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap diri terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan harus pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik secara pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu kepada diri terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawab perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada

memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan diperimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Pemerintah Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan tetap berada didalam tahanan.

2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahap tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan

sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwaan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum pidana yang dilakukannya.

Dalam Putusan Nomor 869/Pid.B/2016/PN.Mks, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menyakini bahwa diantara 2 (dua) dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian, oleh karena memang unsur-unsur dari pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Kiranpal telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Masuk Dan/Atau Berada Diwilayah Indonesia Dengan Tidak Memiliki Dokumen Perjalanan Dan Visa Yang Sah",

Dalam Putusan Nomor 869/Pid.B/2016/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti 1 (satu) buah dompet. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merugikan Pemerintah Indonesia. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum sebelumnya, dan terakhir terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kiranpal dengan pidana penjara 6 (enam) bulan, meskipun Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman 8 (bulan) penjara.

Dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara terhadap penjara, penulis telah sependapat dengan vonis Majelis Hakim yang memberikan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan tidak mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000.

Berkaitan dengan perkara yanaag penulis bahas dan setelah melakukan wawancara dengan Hakim Ketua yang memutus kasus ini yaitu Kristijan P. Djati, SH, maka diperoleh kesimpulan bahwa ada kaitan antara pemidanaan dengan fakta-fakta serta keadaan yang meliputi kasus ini.

Salah satu poin yang penulis dapatkan dari hasil wawancara adalah alasan hakim tidak mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara karena beberapa pertimbangan yaitu:

1. Selama proses persidangan terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang setiap perbuatannya.
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

3. Melihat terdakwa sebenarnya hanya menjadi korban dari agen yang ingin membawa terdakwa ke Australia tetapi melalui Indonesia.
4. Melihat daya tampung rutan yang semakin membludak, Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik memulangkan terdakwa ke Negara asalnya, karena pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa sudah dirasa cukup untuk memberikan efek jera.
5. Terdakwa baru pertama kalinya dihukum, apabila dihukum terlalu lama dikhawatirkan tujuan pemidanaan yang bertujuan untuk memperbaiki kelakuan terdakwa, justru malah akan menyimpangi dari tujuan awal pemidanaan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim memperingankan hukuman yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari 8 (delapan) bulan pidana penjara dan pidana denda Rp. 100.000.000,- menjadi 6 (enam) bulan pidana denda Rp. 100.000.000,-.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia dengan tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dalam Putusan Nomor 869/Pid.B/2016/PN.Mks telah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 2 (dua) dakwaan, yaitu Primair Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian, dan Subsidair Pasal 113 UU Keimigrasian. Diantara unsur-unsur kedua Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah adalah Pasal 119 Ayat (1) UU Keimigrasian. Dimana antara perbuatan dan unsur-unsur Pasal saling mencocoki.
2. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia dengan tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dalam melakukan pembedaan telah tepat karena Hakim dalam perkara Nomor 869/Pid.B/2016/PN.Mks menjatuhkan pembedaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang menurut Pasal 184

KUHAP merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya alat-alat bukti tersebut mendukung fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan hakim bahwa tindak pidana masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia dengan tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya

B. Saran

1. Pemerintah harus memperketat warga negara asing untuk masuk wilayah Indonesia secara ilegal. Dalam hal ini Ditjen Imigrasi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu melakukan patroli diwilayah laut harus lebih diintensifkan dengan menambah kapal-kapal yang dimiliki oleh TNI-AL dan Polisi Air. Selain itu perwakilan pemerintah juga harus lebih sering mensosialisasikan ke Negara asal imigran gelap, bahwa Indonesia tak segan untuk menjatuhkan sanksi yang berat.
2. Pemerintah bisa meminta perhatian pemerintah Australia dan Malaysia untuk turut membantu Indonesia menghadapi masalah imigran gelap. Kepada Malaysia, pemerintah dapat meminta Malaysia untuk meninjau kebijakan memberi bebas visa bagi Negara asla imigran gelap. Kebijakan ini memungkinkan para imigran gelap untuk masuk ke Indonesia melalui jalur tikus (ilegal) di darat maupun laut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, dan Flora Liman P, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*, Jakarta; UKI 2002
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Adjat Sudrajat Hafid, 2012. *Formalitas Keimigrasian*, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM PT. Tamita Utama Jakarta
- Imam Santoso, 2007. *Perspektif Imigrasi*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- _____, 2014. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI-Press.
- I Made Widnyana, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- Jazim Hamidi, 2015. *Hukum Keimigrasian*, Jakarta Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moelyatno, 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adya Bakti.
- _____, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sudarsono, 1994. *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, MA dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh Prasteyo, 2011. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian